DOMINASI SKEMA BISNIS DALAM OSS RBA SEBAGAI ANCAMAN BAGI MASA DEPAN PERTANIAN DAN TATA GUNA LAHAN DI INDONESIA

Veronica Kinanthi Sihutami¹, Najwa Yorry Nordyaningrum²
Universitas Sugeng Hartono, Sukoharjo, Indonesia
verokinanthi@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 22 April 2025
Naskah diterima : 6 Mei 2025
Naskah diterbitkan : 31 Juli 2025

Abstract

The dominance of business interests in the risk-based business licensing (OSS RBA) policy has created a new dynamic in the relationship between business law and agrarian law in Indonesia. The OSS RBA system, implemented through Government Regulation No. 5 of 2021 under the umbrella of the Job Creation Law, was designed to simplify bureaucracy and attract investment. However, in practice, this scheme has opened up ample space for corporations to access and control land, including productive agricultural land, without robust land-use control mechanisms. The conversion of agricultural land to industrial areas, housing, and other commercial projects has been massive and rapid, leading to the degradation of agrarian space, unequal access to land, and threatening national food security. This study aims to critically evaluate how the dominance of business logic in the OSS RBA has displaced the principles of agrarian justice and environmental sustainability that should be maintained within the national land law system. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis, this study recommends the need to reformulate business licensing policies to be more sensitive to the social function of land and the importance of integrating agrarian values into the business legal framework. Without a shift in the legal paradigm that prioritizes sustainability and spatial equity, the future of agriculture in Indonesia will be increasingly marginalized by the logic of capital accumulation and economic expansion alone.

Keywords: OSS RBA, Land Conversion, Investment, Licensing, and Food Security.

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional dalam beberapa dekade terakhir menempatkan investasi sebagai pilar utama dalam strategi pertumbuhan. Untuk menudukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi regulasi guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu instrument regulasi yang

paling menonjol adalah implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), yang diatur melalui peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Skema ini dihadirkan untuk merespons kebutuhan efisiensi birokrasi dan percepatan layanan perizinan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah kompetisi global.

Namun, percepatan investasi melalui OSS RBA telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap pengelolaan sumber daya agraria, khususnya dalam konteks pengendalian tata guna lahan. Dalam praktiknya, sistem OSS RBA mempermudah proses konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian seperti industri, perumahan, dan infrastruktur komersial lainnya, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat terhadap fungsi sosial tanah. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan agrarian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Peralihan fungsi lahan secara masif tidak hanya mengganggu ekosistem agrarian, namun juga mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional dan menimbulkan ketimpangan structural dalam penguasaan tanah. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, konflik agraria yang melibatkan sektor korporasi dan lahan pertanian mencapai 212 kasus, dengan luas wilayah terdampak mencapai lebih dari 500.000 hektare.² Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan perizinan usaha yang tidak sensitive terhadap aspek agraria dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan ketimpangan akses terhadap tanah.

Permasalahan utama yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah absennya sinkronisasi antara kebijakan hukum bisnis yang pro-investasi dengan kerangka hukum agraria yang menjunjung tinggi keadilan dan keberlanjutan. OSS RBA sebagai instrument hukum administrasi bisnis, dalam banyak kasus, berjalan secara sectoral dan teknokratik, tanpa mempertimbangkan karakteristik sosiologis dan

¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

² Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun KPA 2023: Reforma Agraria di Persimpangan Jalan, Jakarta: KPA, 2024, Hlm. 12-14.

ekologis dari lahan yang menjadi obyek izin. Kondisi ini membuka ruang bagi ekspansi bisnis berbasis perizinan, namun dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ruang dan tanah yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 2 (dua) pertanyaan hukum utama sebagai berikut:

1. Apakah skema OSS RBA sebagai instrument perizinan berbasis risiko sejalan dengan prinsip keadilan agraria sebagaimana diatur dalam UUPA dan Konstitusi?
2. Bagaimana pengaruh dominasi logika hukum bisnis dalam OSS RBA terhadap perlindungan lahan pertanian dan pengakuan hak-hak agraria masyarakat?

Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa tanpa koreksi mendasar terhadap paradigma hukum dalam skema perizinan berusaham masa depan pertanian Indonesia berada dalam ancaman serius akibat liberalisasi ruang yang tidak terkendali, serta kehilangan orientasi terhadap kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku dengan bertumpu pada studi dokumen, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami struktur dan karakter hukum yang mengatur skema perizinan OSS RBA serta korelasinya dengan prinsip-prinsip dasar hukum agraria di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah,

hasil penelitian sebelumnya, dan artikel akademik yang membahas topik seputar hukum bisnis, hukum agraria, serta keterkaitannya dengan tata kelola ruang. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks perundang-undangan digunakan untuk memperkuat penelusuran konsep dan istilah yang digunakan dalam analisis.

Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis pertentangan antara paradigma hukum bisnis yang liberal dengan paradigma hukum agrarian yang berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Selain itu, digunakan pula pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) secara terbatas, untuk melihat bagaimana negara lain mengatur keterhubungan antara sistem perizinan bisnis dan perlindungan agrarian, sebagai bahan refleksi terhadap penguatan sistem hukum nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum secara sistematis, menghubungkannya dengan konteks sosio-yuridis yang terjadi di lapangan, serta menguji konsistensi dan koherensi antara norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari analisis ini adalah mengidentifikasi ketidaksinkronan regulative, menemukan celah hukum (*legal gap*), serta menawarkan formulasi hukum alternatif yang dapat menjembatani kepentingan ekonomi dan perlindungan agraria secara seimbang,

C. HASIL PEMBAHASAN

Paradoks Hukum dalam Implementasi OSS RBA: Ketidakseimbangan Antara Kepastian Usaha dan Keadilan Agraria

Skema OSS RBA, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang mencakup izin Lokasi dan izin lingkungan. Namun, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan teknokratis, tanpa mempertimbangkan karakteristik sosiologis dan ekologis dari lahan yang menjadi obyek izin.

Dalam praktiknya, OSS RBA telah membuka ruang bagi ekspansi korporasi ke dalam ruang agraria yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian

produktif. Dengan hanya berbekal NIB, pelaku usaha dapat mengubah fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian seperti industri dan perumahan, tanpa mekanisme pengawasan yang ketat terhadap fungsi sosial tanah. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan agraria sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, pendekatan OSS RBA memperkuat rezim hukum perizinan sebagai satu-satunya filter terhadap pemanfaatan ruang, yang secara *de facto* meminggirkan peran hukum agraria substantif. Hal ini terlihat dari lemahnya integrasi antara OSS RBA dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang secara eksplisit melarang konversi lahan sawah produktif kecuali untuk kepentingan strategis nasional dan melalui mekanisme ketat. Dalam banyak kasus, OSS RBA justru melahirkan penyederhanaan administratif yang melemahkan pengawasan terhadap pelanggaran prinsip keberlanjutan agraria tersebut.

Implikasi Praktis OSS RBA Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Ketimpangan Akses Agraria

Implementasi skema OSS RBA telah menciptakan disrupsi besar dalam struktur tata kelola lahan di Indonesia, khususnya dalam konteks keberlanjutan pertanian. Rezim perizinan yang semula didesain untuk mendorong efisiensi dan memperkuat kepastian hukum investasi ternyata menjadi pintu masuk bagi liberalisasi ruang agrarian secara besar-besaran. OSS RBA memberikan kemudahan luar biasa bagi pelaku usaha untuk mengakses lahan hanya dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa keharusan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan perencanaan tata ruang, ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, atau penilaian risiko agraria yang komprehensif.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya OSS RBA, telah terjadi percepatan alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Misalnya, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, alih fungsi lebih dari 1.200 hektare sawah produktif menjadi kawasan industri dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun pasca pemberlakuan OSS RBA menjadi indikasi lemahnya koordinasi antara kebijakan investasi dan perlindungan agrarian. Hal serupa juga terjadi di kawasan pesisir utara Jawa dan sebagian wilayah Sumatera, di mana proyek strategis nasional dan

kawasan ekonomi khusus (KEK) menggeser lahan pertanian produktif yang sebelumnya menopang ekonomi lokal berbasis pertanian.

Ketimpangan akses agrarian juga semakin tajam. Petani kecil dan komunitas lokal kerap kali tidak dilibatkan dalam proses konsultasi publik atau penilaian risiko sosial atas proyek-proyek investasi yang masuk melalui skema OSS RBA. Akibatnya, terjadi eksklusi sosial dan hilangnya control masyarakat atas ruang hidup mereka sendiri. Dalam sejumlah kasus, masyarakat bahkan menghadapi kriminalisasi saat menolak proyek investasi yang mengancam sumber mata pencaharian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi logika bisnis dalam OSS RBA telah memarjinalkan dimensi hak-hak agraria masyarakat, yang seharusnya menjadi elemen sentral dalam tata kelola lahan yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, kelemahan dalam sistem verifikasi risiko OSS RBA menjadikan perlindungan terhadap lahan pertanian hanya bersifat formalitas. Mekanisme *self-assessment* yang diandalkan dalam penentuan tingkat risiko usaha sering kali diisi secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa verifikasi lapangan yang memadai dari pemerintah. Keterlibatan aktif institusi pengelola agraria seperti Kementerian ATR/BPN maupun Dinas Pertanian dalam proses evaluasi risiko menyebabkan banyak proyek bisnis meloloskan izin tanpa memperhatikan keberadaan lahan pertanian yang dilindungi. Dengan kata lain, OSS RBA menciptakan struktur hukum yang memberi ruang terlalu besar pada kepentingan privat, namun minim instrument pengawasan publik.

Konsekuensi dari dominasi pendekatan hukum bisnis dalam OSS RBA adalah terkikisnya peran negara sebagai pengatur dan pelindung hak-hak agraria masyarakat, serta meningkatnya kecenderungan negara untuk berperan sebagai fasilitator kepentingan pasar. Perizinan usaha yang seharusnya dikendalikan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan publik justru bergeser menjadi alat legitimasi eksploitasi lahan secara masif oleh entitas bisnis. Hal ini memunculkan *regulatory capture*, di mana regulasi dan proses perizinan tidak lagi mencerminkan kepentingan umum, tetapi dikendalikan oleh logika kapital dan akumulasi modal.

OSS RBA, dalam kerangka ini, secara tidak langsung menegasikan semangat reformasi agraria yang selama ini diperjuangkan untuk mewujudkan keadilan distribusi tanah. Proses-proses yang seharusnya mengedepankan keberpihakan pada kelompok rentan seperti petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal, kini justru

dikalahkan oleh klaim legal formal perusahaan yang dibungkus dalam narasi efisiensi dan investasi. Dalam jangka panjang hal ini tidak hanya memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperlemah fondasi keberlanjutan ruang dan pangan di Indonesia.

Ketimpangan Struktur Hukum dalam OSS RBA dan Melemahnya Proteksi Hak Agraria Masyarakat

Dominasi skema hukum bisnis dalam OSS RBA tidak hanya menghasilkan deregulasi dalam aspek administratif, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan dalam struktur hukum yang melemahkan perlindungan terhadap hak-hak agraria masyarakat. OSS RBA mengadopsi pendekatan hukum yang bersifat teknokratis dan berbasis risiko, di mana pemrosesan izin usaha sangat bergantung pada klasifikasi risiko rendah, menengah, atau tinggi, tanpa memperhitungkan konteks sosial-ekologis dari tanah yang menjadi obyek perizinan.³

Dalam banyak kasus, logika hukum dalam OSS RBA cenderung mengabaikan peran serta masyarakat, terutama petani, komunitas adat, dan masyarakat lokal yang memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanahnya. Penyederhanaan izin usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan minimnya mekanisme konsultasi publik menyebabkan proses perizinan seringkali berjalan secara *top-down*, tanpa ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyuarakan haknya atas ruang hidup.⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA.

Ketidakhadiran mekanisme partisipasi dalam OSS RBA juga mengikis prinsip-prinsip keadilan prosedural yang menjadi elemen penting dalam hukum agraria. Dalam kerangka hukum progresif, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir (*substantive justice*), tetapi juga dari proses hukum yang transparan, partisipatif dan akuntabel.⁵ Sayangnya, OSS RBA justru menyingkirkan prinsip ini dengan menggantinya melalui logika efisiensi prosedural berbasis digitalisasi dan klasifikasi risiko.

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif dan Analisis Kritis Terhadap UU Cipta Kerja* (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 135.

⁴ Achmad Sulaiman, *OSS RBA dan Problem Partisipasi dalam Perizinan Berusaha*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 2 (2022): 211, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.52.no2.3345>.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 58.

Ketentuan dalam OSS RBA yang tidak mewajibkan partisipasi masyarakat secara substansial dalam proses perizinan berusaha bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pengelolaan sumber daya agrarian, negara wajib menjamin hak masyarakat untuk mendapat informasi, menyatakan pendapat, dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup mereka. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas informasi dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Lebih lanjut, pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak setiap orang untuk hidup, menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Dalam konteks agrarian, Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang mengandung kewajiban untuk tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar. Ketika proses perizinan lahan dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa mempertimbangkan fungsi sosial tanah, maka negara telah abai dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional dan yuridisnya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam penguasaan, pemanfaatan dan peruntukan tanah.

Lebih jauh lagi, keberadaan OSS RBA yang mengandalkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan perizinan telah menciptakan disonansi antara norma hukum yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat agrarian dengan praktik perizinan yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi jangka pendek. Penfokusan yang sempit pada aspek ekonomi dalam perizinan berdampak pada pengabaian terhadap kelestarian lingkungan dan hak atas tanah masyarakat, terutama di kawasan pertanian yang menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak jarang, implementasi OSS RBA justru memberi ruang bagi konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial atau industry, yang mengancam keberlanjutan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, prinsip keadilan sosial dalam hukum agraria yang seharusnya dapat dilihat sebagai landasan utama, harus bersinggungan dengan ketentuan tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat yang diatur dalam UUPA. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjamin bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat harus diakui dan dihormati, namun dengan hadirnya OSS RBA yang mengabaikan konteks kultural dan sosial masyarakat adat, maka proses perizinan ini tidak hanya

melanggar prinsip-prinsip tersebut tetapi juga membatasi ruang Gerak dan hak mereka dalam mengelola tanah warisan mereka.

Secara substansial, mekanisme perizinan yang dijalankan oleh OSS RBA tidak memperhitungkan aspek keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip tata kelola sumber daya alam yang adil. Dalam banyak kasus, penyerahan izin usaha kepada perusahaan besar dengan menyalurkan hak atas tanah yang telah lama dikelola oleh masyarakat lokal dan petani, tanpa melalui proses musyawarah atau konsultasi dengan pihak terkait, menimbulkan ketegangan sosial. Kewajiban negara untuk melakukan redistribusi tanah dan memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi hak bersama, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, seharusnya lebih ditegakkan agar tercipta kesejahteraan yang merata.

Di sisi lain, jika terlihat perspektif hukum progresif, penerapan OSS RBA mengabaikan kenyataan bahwa hukum harus responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hanya berlaku sebagai instrument yang menyederhanakan proses administrasinya tetapi juga harus mengutamakan keadilan substantif yang memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk memperoleh hak mereka secara merata. Hukum progresif menekankan bahwa sistem hukum harus dapat memberikan jalan bagi realisasi hak-hak konstitusional masyarakat yang selama ini terpinggirkan, termasuk hak agraria mereka.⁶

Konsekuensi dari dominasi pendekatan hukum bisnis dalam OSS RBA juga tercermin dalam lemahnya daya ikat terhadap norma-norma hukum agraria yang lebih berpihak pada perlindungan masyarakat. Misalnya, meskipun Pasal 10 UUPA menegaskan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan atau memanfaatkan tanahnya secara aktif guna mencegah terjadinya tanah terlantar, namun ketentuan ini tidak diintegrasikan secara eksplisit dalam sistem OSS RBA, sehingga membuka celah bagi spekulasi lahan dan penguasaan tanah oleh korporasi tanpa pemanfaatan yang jelas. Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja memperlihatkan penekanan yang sangat kuat pada aspek perizinan teknis, seperti Analisis Risiko dan Sertifikasi Standar, namun mengesampingkan evaluasi berbasis hak atas tanah dan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini menandakan adanya kecenderungan formalisasi hukum yang mengedepankan

⁶ Satya Dharma, *Hukum Progresif dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), Hlm. 75.

kelengkapan dokumen administratif, namun mengabaikan prinsip substansial dalam hukum agrarian, yaitu fungsi sosial dan keadilan distribusi.

Berdasarkan kerangka normatif Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka negara memiliki tanggung jawab aktif untuk mengatur dan mengawasi agar setiap penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, ketika OSS RBA tidak mensyaratkan verifikasi sosial atau analisis dampak agrarian dalam proses perizinannya, maka negara telah gagal memenuhi mandat konstitusional tersebut. Skema OSS RBA juga belum mengadopsi prinsip-prinsip *Free, Prior dan Informed Consent* (FPIC) yang telah menjadi norma internasional dalam perlindungan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).⁷ Meskipun Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrument HAM Internasional, namun hingga kini belum ada pengaturan teknis dalam OSS RBA yang mewajibkan adanya proses FPIC dalam pemberian izin usaha yang menyangkut tanah ulayat atau wilayah adat. Dominasi rezim hukum bisnis dalam OSS RBA secara tidak langsung telah menggeser locus keadilan agraria dari perlindungan masyarakat ke arah pengamanan investasi. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang memerlukan koreksi melalui harmonisasi regulasi antara hukum bisnis dan hukum agrarian yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, dominasi pendekatan hukum bisnis dalam OSS RBA secara nyata telah menggantikan paradigma keadilan agraria yang seharusnya menjadi dasar pengaturan dan pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Orientasi OSS RBA yang menekankan efisiensi prosedural dan kemudahan investasi telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum agraria nasional, seperti fungsi sosial tanah, perlindungan masyarakat adat, dan keadilan distributive. Ketimpangan struktural ini tidak hanya mengancam eksistensi hak-hak agrarian masyarakat, tetapi juga menegaskan urgensi dilakukannya harmonisasi regulasi antara rezim hukum bisnis dan hukum agraria. Upaya tersebut harus mengarah pada pembentukan sistem perizinan yang menjamin keterlibatan masyarakat secara bermakna, melindungi hak atas tanah, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan selalu berlandaskan pada keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

⁷ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), General Assembly Resolution 61/295, 13 September 2007.

Konsekuensi Yuridis Dominasi Skema OSS RBA Terhadap Masa Depan Pertanian dan Keadilan Agraria

Dominasi pendekatan hukum bisnis dalam sistem OSS RBA tidak hanya memunculkan ketimpangan struktural dalam perlindungan hukum agraria, tetapi juga menghasilkan konsekuensi yuridis yang berimplikasi langsung terhadap masa depan sektor pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh cara pandang regulasi yang menempatkan tanah sebagai komoditas dalam mekanisme investasi, bukan sebagai ruang hidup dan sarana produksi utama masyarakat agraris.⁸ Paradigma ini bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip keadilan agraria yang mengutamakan pemerataan, perlindungan hak atas tanah, serta keberlanjutan ekosistem pertanian.

Konsekuensi pertama adalah melemahnya kedaulatan petani dan masyarakat adat atas tanah. OSS RBA, melalui pendekatan perizinan berbasis risiko yang seragam dan terpusat, secara tidak langsung mengabaikan pluralitas sistem penguasaan tanah, termasuk hak ulayat dan bentuk-bentuk pengelolaan tanah berbasis komunitas. Dalam praktiknya, proses penerbitan izin usaha untuk kegiatan komersial sering kali dilakukan tanpa identifikasi menyeluruh terhadap status penguasaan tanah atau sejarah pengelolaannya oleh komunitas lokal. Situasi ini menimbulkan konflik agraria yang tidak jarang berujung pada kriminalisasi petani atau penggusuran paksa masyarakat dari tanah yang secara historis telah mereka kelola secara turun-temurun. Konsekuensi kedua adalah berkurangnya jaminan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan. Dalam skema OSS RBA, tidak terdapat prosedur khusus yang mensyaratkan pertimbangan keberlanjutan sistem pertanian, termasuk keberadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dominasi logika investasi menyebabkan tanah-tanah produktif pertanian lebih rentan dikonversi menjadi kawasan industri, pariwisata, atau properti dengan dalih efisiensi ekonomi dan peningkatan nilai investasi. Konsekuensi ketiga adalah terpinggirkannya prinsip distribusi keadilan dalam hukum agraria. UUPA secara eksplisit menempatkan keadilan sosial sebagai dasar pengaturan pertanahan, dengan menekankan pentingnya pembatasan penguasaan tanah yang berlebihan, pembagian tanah yang merata, serta pengakuan atas hak-hak masyarakat kecil. Namun OSS RBA justru memperkuat posisi

⁸ Sutyono, A. (2022). *Tanah dan Investasi: Politik Agraria dalam Era Deregulasi*. Yogyakarta: STPN Press, Hlm. 34.

korporasi besar dan pemodal melalui penyederhanaan birokrasi yang tidak dibarengi dengan kewajiban redistribusi atau reformasi agraria. Konsekuensi yuridis berikutnya adalah meningkatnya ketimpangan akses terhadap tanah antara pelaku usaha besar dan petani kecil. Skema OSS RBA secara struktural lebih menguntungkan pemilik modal yang memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk memenuhi standar perizinan dan persyaratan investasi. Sebaliknya, petani kecil yang minim akses terhadap informasi, penadmpingan hukum, maupun infrastruktur digital seringkali tidak mampu bersaing dalam sistem yang sangat teknokratis tersebut.

Lebih jauh, dominasi hukum bisnis dalam OSS RBA juga mengancam keberlanjutan ekosistem agraria secara holistik. Tanpa regulasi yang berpihak pada prinsip *intergenerational justice* dan pelestarian fungsi ekologis tanah, maka pembangunan berbasis izin usaha hanya akan menghasilkan akumulasi kapital jangka pendek dengan mengorbankan daya dukung lingkungan dan ketahanan pangan nasional.

Dari sudut pandang yuridis, situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reorientasi regulasi agar selaras dengan mandat konstitusional dan prinsip dasar hukum agraria nasional. Harmonisasi antara hukum bisnis dan hukum agraria harus dilakukan melalui pendekatan yang integratif dan berbasis keadilan sosial. Setiap izin usaha yang berdampak pada tanah seharusnya diwajibkan melalui analisis dampak agraria yang melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.

D. SIMPULAN

Dominasi Hukum Bisnis dalam sistem OSS berbasis risiko mencerminkan pergeseran orientasi hukum dari peran sosial-politiknya menuju fungsi instrumental semata-yaitu sebagai alat deregulasi demi efisiensi dan percepatan investasi. Dalam konteks pengelolaan agrarian, pendekatan ini menghasilkan ketimpangan yang serius karena mengabaikan dimensi keadilan agrarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Lahan pertanian sebagai sumber kehidupan petani dan basis kedaulatan pangan nasional tidak lagi dilihat sebagai entitas strategis yang harus dijaga, melainkan sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar dan pertimbangan risiko usaha.

Ketika hukum dikonstruksi hanya untuk menjamin kepastian usaha dan meminimalisasi beban regulasi bagi investor maka relasi kuasa antara negara, pasar dan masyarakat berubah secara signifikan. Negara tidak lagi tampil sebagai pelindung kelompok rentan, tetapi sebagai fasilitator utama bagi kepentingan modal. Hal ini

memperlemah perlindungan terhadap lahan pertanian dari alih fungsi yang destruktif, terutama karena proses perizinan berbasis risiko mengedepankan analisis teknokratis semata dan mengabaikan konteks sosial-agraria yang melekat pada tanah.

Sistem OSS RBA, dalam kerangka ini, tidak hanya menjadi instrument legal-formal, tetapi juga representasi dari logika politik hukum yang menempatkan investasi di atas keadilan struktural. Implikasinya, control sosial terhadap tanah melemah, partisipasi masyarakat termarginalisasi, dan hak atas tanah menjadi semakin rapuh, terutama bagi petani kecil dan komunitas adat yang selama ini bergantung pada tanah untuk hidup dan identitas sosial mereka.

Dengan demikian, perlu ada koreksi mendasar terhadap paradigma hukum yang digunakan dalam kebijakan perizinan. Reorientasi ini harus mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai instrument keadilan sosial dan pengatur relasi kuasa yang adil antara negara, pasar, dan rakyat. Ke depan, keberlanjutan lahan pertanian hanya dapat dijamin jika hukum tidak semata-mata melayani efisiensi ekonomi, tetapi juga memuat mekanisme perlindungan ekologis dan jaminan hak-hak agrarian sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari berbagai temuan dan analisis kritis terhadap ketimpangan regulasi dalam skema OSS RBA, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan terkait:

1. Harmonisasi Regulasi antara Hukum Bisnis dan Hukum Agraria:

Pemerintah perlu melakukan revisi dan harmonisasi terhadap peraturan pelaksanaan OSS RBA agar tidak mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum agraria, seperti fungsi sosial tanah, perlindungan masyarakat hukum adat, dan keadilan distribusi. Regulasi turunan dari UU Cipta Kerja, khususnya PP Nomor 5 Tahun 2021, harus menyertakan ketentuan mengenai perlunya analisis dampak sosial-agraria dan konsultasi publik dalam setiap proses perizinan lahan, terutama di wilayah yang memiliki nilai sosial, kultural, atau ekologis tinggi.

2. Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik dalam FPIC

Diperlukan penguatan mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna, terutama melalui pengapdosian prinsip FPIC dalam sistem OSS RBA. Ketentuan ini penting

untuk menjamin hak masyarakat adat dan petani atas tanahnya, sesuai dengan norma internasional dan amanat Pasal 28I UUD 1945. OSS RBA harus diubah dari sistem perizinan yang top-down menjadi instrument yang memuka ruang deliberatif bagi warga.

3. Penerapan Keadilan Agraria Sebagai Prinsip Utama dalam Kebijakan Investasi
Skema investasi nasional perlu didasarkan pada paradigma keadilan agraria, bukan semata efisiensi ekonomi. Pemerintah harus menetapkan indikator keberhasilan pembangunan berbasis redistribusi tanah yang adil, keberlanjutan ekologi, dan kesejahteraan petani serta masyarakat lokal. Instrument seperti peta indikatif alih fungsi lahan pertanian dan audit sosial perizinan harus dilembagakan dalam sistem OSS RBA agar tujuan pembangunan inklusif tercapai.
4. Evaluasi Berkala Terhadap Dampak Implementasi OSS RBA
Pemerintah dan akademisi perlu mendorong adanya evaluasi independent dan berkala terhadap dampak penerapan OSS RBA, khususnya terhadap keberlanjutan pertanian, konflik agraria dan penguasaan tanah. Hasil evaluasi ini harus dipublikasikan secara terbuka dan dijadikan dasar pembaruan kebijakan perizinan agar lebih berkeadilan.
5. Pemberdayaan Kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam Aspek Agraria
Dibutuhkan program edukasi hukum dan literasi agrarian baik bagi aparat pemerintah daerah maupun masyarakat lokal agar memiliki pemahaman kritis terhadap hak atas tanah dan proses perizinan. Tanpa pemberdayaan, ketimpangan pengetahuan akan terus memperkuat dominasi kelompok modal dan melemahkan posisi tawar masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sulaiman, *OSS RBA dan Problem Partisipasi dalam Perizinan Berusaha*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, No. 2 (2022): 211, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.52.no2.3345>.

Konsorium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun KPA 2023: Reforma Agraria di Persimpangan Jalan*, Jakarta: KPA, 2024, Hlm. 12-14.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif dan Analisis Kritis Terhadap UU Cipta Kerja* (Jakarta: Kencana, 2021), Hlm. 135.

United Nations Declaration on the Rights of Indegenous Peoples (UNDRIP), General Assembly Resolution 61/295, 13 September 2007.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 58.

Satya Dharma, *Hukum Progresif dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), Hlm. 75.

Sutiyono, A. (2022). *Tanah dan Investasi: Politik Agraria dalam Era Deregulasi*. Yogyakarta: STPN Press, Hlm. 34.